SEMDI UNAYA-2017, 52-62
November 2017
http://ocs.abulyatama.ac.id/

ANALISIS PENGGUNAAN LAHAN PERMUKIMAN DI KAWASAN PERI URBAN KOTA BANDA ACEH (STUDI KASUS: KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR)

Muhammad Rusdi[1], Desra Sahputra[2], Sugianto Sugianto[3]
[1,2,3)]Program Studi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala,
email: emrusdi@unsyiah.ac.id, desrasahputra@gmail.com, sugianto@unsyiah.ac.id

Abstract:*The deviation of land use is very frequent happened to spatial planning. Suburban areas are areas which undergo many changes in land use, especially changes in the use of agricultural land to non-agricultural. The purpose of the research is to analyze the aligned level of the existing settlements use in Darul Imarah sub-district based on spatial planning. The method used in this research was descriptive method with survey technique. While the spatial data analysis was using GIS with extract, overlay and reclassify concept. The result of the study showed that 1019.6 ha (89.09%) of the existing settlements fields in the study area were aligned with the spasial planning and the non-aligned ones were 124.80 ha (10.91%).*

Keywords : Settlement, area development, peri-urban, spasial planning, GIS

Abstrak: Penyimpangan penggunaan lahan sangat sering terjadi terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW). Daerah pinggiran kota merupakan wilayah yang banyak mengalami perubahan penggunaan lahan terutama perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi non pertanian. Adapun tujuan penelitian untuk menganalisis tingkat keselarasan penggunaan lahan permukiman eksisting di Kecamatan Darul Imarah berdasarkan RTRW. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan teknik survai. Sedangkan analisis data spasial menggunakan SIG dengan konsep extract, overlay dan reclassify. Hasil kajian menunjukkan sebesar 1.019,61 ha (89,09%) permukiman eksisting di kawasan kajian telah selaras dengan RTRW dan yang tidak selaras yaitu sebesar 124,80 ha (10,91%).

Kata kunci : Permukiman, pengembangan wilayah, peri-urban, RTRW, SIG

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan regional dan nasional. Salah satu upaya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang baik yaitu dengan menata penggunaan lahan seoptimal mungkin sebagaimana yang telah diatur dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) Provinsi/Kabupaten/Kota. Namun didalam pelaksanaannya masih banyak ditemukan penggunaan lahan yang tidak selaras dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW).

Ketidakselarasan ini seringkali terjadi pada lahan pertanian yang dialih fungsikan mejadi non petanian. Hasil kajian Rahayu (2009) daerah pinggiran kota merupakan wilayah

yang banyak mengalami perubahan penggunaan lahan terutama perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi non pertanian disebabkan adanya pengaruh perkembangan kota di dekatnya. Kota Banda Aceh merupakan salah satu kota yang memiki pengaruh terhadap perkembangan wilayah di sekitarnya. Menurut Kamaruzzaman (2009) semenjak terjadinya bencana gempa dan tsunami di Aceh, pembangunan di Kota Banda Aceh mengalami pergeseran yang semakin mengarah ke wilayah selatan kota yang merupakan daerah pinggiran Kota Banda Aceh.

Kecamatan Darul Imarah merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Besar yang secara administrasi berbatasan langsung dengan Kota Banda Aceh. Berdasarkan data yang tercatat di BPS Kabupaten Aceh Besar (2016) Kecamatan Darul Imarah merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk tertinggi di Kabupaten Aceh Besar dan terus meningkat setiap tahunnya. Menurut Khadiyanto (2005), pertumbuhan penduduk yang pesat seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan lahan seringkali mengakibatkan benturan kepentingan atas penggunaan lahan sehingga memungkinkan terjadinya ketidakselarasan antara penggunaan lahan dengan rencana peruntukannya. Adapun tujuan dari kajian ini untuk menganalisis tingkat keselarasan penggunaan lahan permukiman eksisting di Kecamatan Darul Imarah berdasarkan RTRW.

KAJIAN PUSTAKA

Permukiman

Permukiman sering disebut perumahan dan atau sebaliknya. Permukiman berasal dari kata *housing* dalam bahasa Inggris yang artinya perumahan dan kata *human settlement* yang artinya permukiman. Menurut Undang-undang No 1 tahun 2011, kawasan permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Perumahan dan permukiman adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan berkaitan erat dengan aktifitas ekonomi, industrialisasi dan pembangunan daerah.

Peri Urban

Peri urban sering diidentikkan dengan proses area desa yang berubah menjadi karakter kota, baik dalam hal fisik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Istilah peri merupakan kata sifat yang dapat diberi makna pinggiran atau sekitar dari suatu objek tertentu. Sementara itu istilah urban juga merupakan kata sifat yang berarti sifat kekotaan atau sesuatu yang berkenaan dengan kota. Penggabungan istilah peri dan urban membentuk kata sifat baru yang secara harfiah berarti sifat kekotaan dan sekitar sehingga apabila digabungkan dengan kata region, maka kata peri-urban region (wilayah peri-urban) mempunyai makna sebagai suatu wilayah di sekitar kota. Menurut Rakodi dan Adell (1998 dan 1999 *dalam* Webster, 2002) jika dilihat secara spasial peri urban merupakan zona transisi antara lahan di kota yang secara keseluruhan terurbanisasi dengan area yang didominasi fungsi pertanian.

Konsep Perencanaan Tata Ruang

Dalam Undang-undang No 26 tahun 2007 yang dimaksud dengan ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang, dimana struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional, sedangkan pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Perencanaan adalah suatu bentuk tindak sosial yang diarahkan pada wujud bentuk lingkungan fisik yang dalam prosesnya dipacu oleh nilai-nilai moral, politik dan estetik (Sirojuzilam, 2007). Sedangkan perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang (Pemerintah Republik Indonesia, 2007).

Perencanaan penggunaan lahan dapat didefinisikan sebagai perencanaan yang mengatur jenis-jenis penggunaan lahan di suatu daerah agar dapat digunakan secara optimal, yaitu memberi hasil yang tertinggi dan tidak merusakkan tanahnya sendiri serta

lingkungannya (Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2007)

Penyusunan rencana tata ruang perlu memperhatikan fungsi yang harus diemban oleh masing-masing ruang/kawasan. Fungsi suatu kawasan akan optimal jika penyusunan rencanatata ruang sebagai tahap awal dari proses penataan ruang mempertimbangkan aspek kesesuaian lahan, kemampuan lahan dan ketersediaan lahan yang selanjutnya akan mendorong pembangunan berkelanjutan (Azhari, 2004 *dalam*Restina (2009).Kajian pustaka berisi tentang teori-teori ataupun kepustakaan yang melandasi penelitian ini. Kajian pustaka akan terdiri dari beberapa judul sub bab.

METODE PENELITIAN

Kajian ini dimulai dari bulan April sampai Juli 2017. Pengolahan data dilakukan di Laboratorium Penginderaan Jauh dan Kartografi Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala. Secara geografis wilayah kajian terletak pada 95°16'42,921" - 95°20'44,683" BT dan 5°3'31,509" - 5°28'43,044" LU. Secara spasial kawasan kajian dapat dilihat pada Gambar 1.

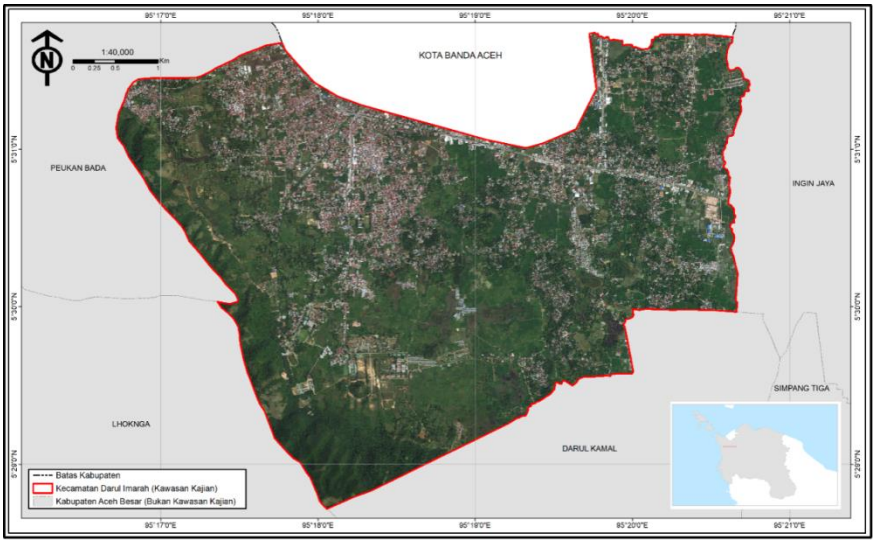

Gambar 1. Peta kawasan kajian

Metode yang digunakan dalam kajian ini yaitu metode deskriptif dengan teknik survai. Analisis data spasial menggunakan SIG dengan konsep *extract, overlay* dan *reclassify.* Teknologi SIG mempunyai kelebihan untuk menginput, editing dan analisis data, baik data geografig maupun atribut, atribut dengan cara yang tepat pada waktu yang cepat (Rusdi *et al*., 2015). Secara umum kajian ini terdiri dari prasurvai dan pasca survai. Prasurvai bertujuan untuk menganalisis data dan menyiapkan data untuk survai ke lapangan, seperti

penyiapanpeta sampel lokasi lahan permukiman eksisting untuk survai. Sedangkan kegiatan pasca survai lebih kepada input dan analisis data hasil survai, serta editing dan digitasi data untuk data final lahan permukiman eksisting di kawasan kajian. Untuk lebih jelasnya motode spasial yang digunakan dalam kajian ini dapat dilihat pada Gambar 2.

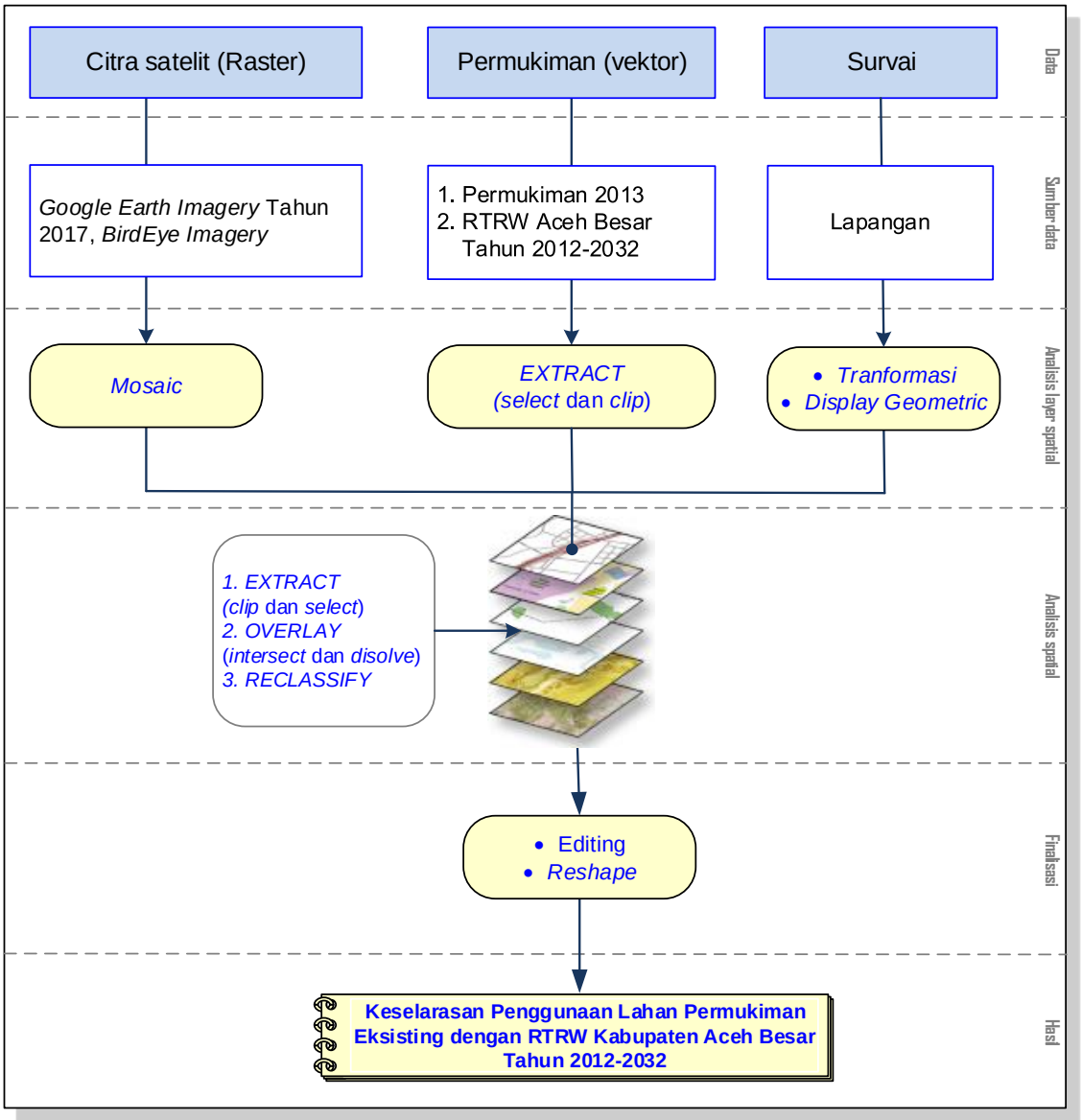

Gambar 2. Diagram alir penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan Lahan Permukiman 2017

Hasil interpretasi citra tahun 2017 didapati luas permukiman di kawasan kajian sebesar 1.144,42 ha atau 47,00% dari luas keseluruhan wilayah kajian. Adapun kenampakan permukiman pada citra dan lapangan seperti yang terlihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Kenampakan permukiman pada citra dan lapangan di kawasan kajian

Permukiman merupakan penggunaan lahan terbesar di kawasan kajian. Dilihat dari sebarannya, permukiman di kawasan kajian lebih terpusat disekitaran Kota Banda Aceh. Adapun secara spasial sebarannya dapat dilihat pada Gambar 4.

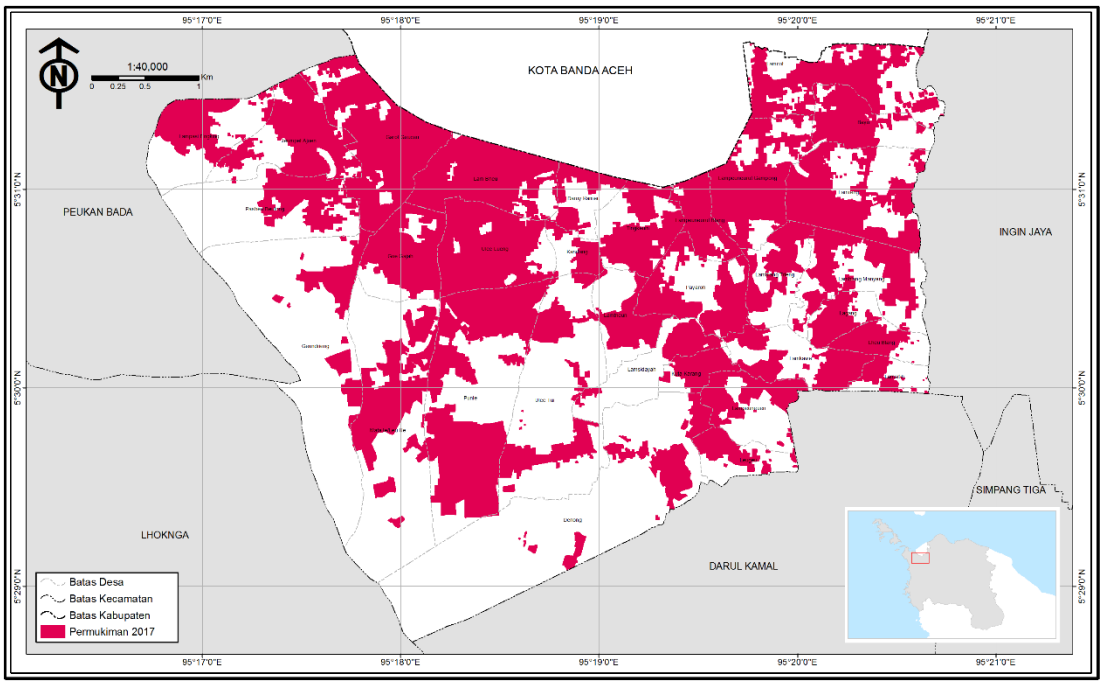

Gambar 4. Peta sebaran lahan permukiman di Kecamatan Darul Imarah

Penggunaan Lahan Permukiman Berdasarkan RTRW Tahun 2012-2032

RTRW Kecamatan Darul Imarah merupakan rencana yang merujuk pada RTRW Kabupaten Aceh Besar tahun 2012-2032 sesuai qanun Kabupaten Aceh Besar No. 4 tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Besar tahun 2012-2032. Berdasarkan RTRW Kabupaten Aceh Besar tersebut didapatkan persentase arahan penggunaan lahan yang dicadangkan untuk permukiman sebesar 1123,66 ha atau 46,15% dari luasan kawasan kajian. Kawasan permukiman tersebut dicadangkan untuk permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan yang masing-masing seluas 1.111,66 ha dan 12,00 ha. Adapun secara spasial sebarannya dapat dilihat pada Gambar 5.

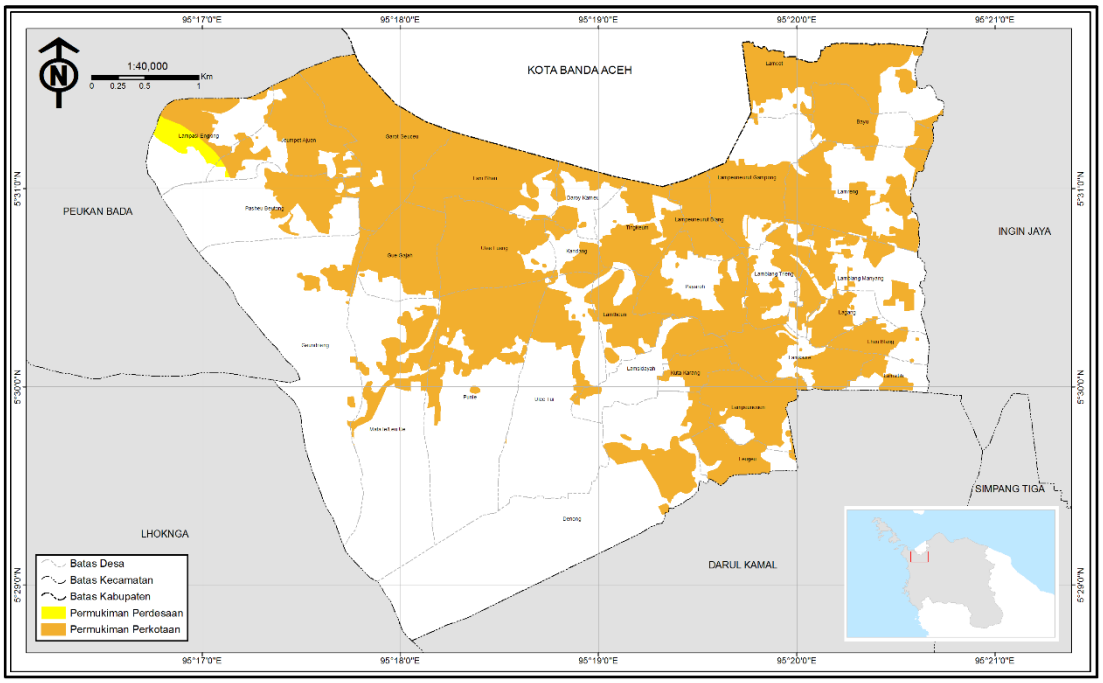

Gambar 5. Peta rencana penggunaan lahan permukiman berdasarkan RTRW Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-2032

Keselarasan Permukiman Eksisting Tahun 2017 Berdasarkan RTRW Tahun 2012-2032

Rencana tata ruang wilayah merupakan hasil analisis kesesuaian penggunaan lahan. Kesesuaian penggunaan lahan terhadap rencana tata ruang wilayah adalah perbandingan antara arahan kawasan menurut tata ruang dengan kondisi eksisting penggunaan lahan saat ini (Andrianto, et al. 2008 dalam Eko dan Rahayu, 2012).

Berdasarkan hasil analisis keselarasan penggunaan lahan dengan pola ruang Kecamatan Darul Imarah didapatkan luas permukiman eksisting yang telah selaras dengan

RTRW seluas 1.019,61 ha dan yang tidak selaras dengan RTRW seluas 124,80 ha. Secara detail persentase keselarasan permukiman eksisting dengan rencana peruntukannya dapat dilihat pada Tabel 1 dan sebarannya secara spasial ditampilkan pada Gambar 6

Tabel 1. Keselarasan penggunaan lahan permukiman eksisting dengan RTRW

Penggunaan Lahan	RTRW	Luas (ha)	(%)	Keselarasan
Permukiman	Permukiman Perkotaan	921,52	80.52	Selaras
	Kawasan HANKAM	88,23	7.71	Selaras
	Permukiman Pedesaan	9,87	0.86	Selaras
	Pertanian Lahan Basah	107,05	9.35	Tidak selaras
	Pertanian Lahan Kering	15,15	1.32	Tidak selaras
	Hutan Lindung	1,32	0.12	Tidak selaras
	Holtikultura	0,97	0.08	Tidak selaras
	Ruang Terbuka Hijau	0,31	0.03	Tidak selaras
Total		1.144,42	100	

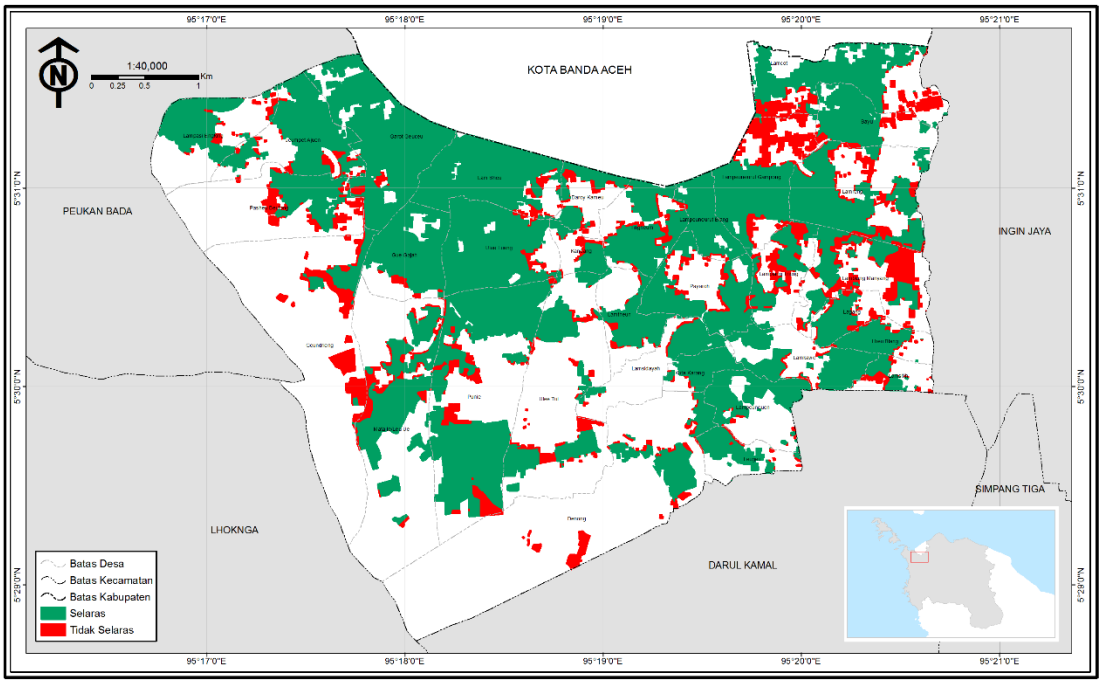

Gambar 6. Peta sebaran keselarasan permukiman eksisting di Kecamatan Darul Imarahberdasarkan RTRW Kabupaten Aceh Besar tahun 2102-2032

Dari Tabel 1 terlihat bahwa hampir keseluruhan ketidakselarasan permukiman eksisting berada di kawasan yang dicadangkan untuk kegiatan pertanian dan hanya sebagian yang terdapat di kawasan lindung. Ketidakselarasan terbesar ditemukan pada peruntukan pertanian lahan basah yaitu seluas 107,05 ha dan yang terkecil ditemukan diperuntukan untuk ruang terbuka hijau yaitu seluas 0,31 ha. Kondisi tersebut dikarenakan sebaran lahan basah di kawasan kajian umumnya berada di sekitaran permukiman

sehingga kemungkinan akan terjadinya alih fungsi lahan menjadi permukiman lebih besar jika dibandingkan dengan kawasan yang berada lebih jauh dari pusat perekonomian.

Gambar 7. Peruntukan pertanian lahan basah yang berubah pemanfaatan menjadi permukiman

Pertubuhan penduduk yang pesat sementara ketersediaaan lahan yang terbatas akan memicu terjadinya ketidakselarasan tersebut. Hal ini dikhawatirkan akan terus meningkat mengingat Kecamatan Darul Imarah merupakan kecamatan yang dicadangkan sebagai kawasan strategis kabupaten (KSK) kawasan perkotaan di sekitar Kota Banda Aceh sebagaimana yang tertuang di dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar No. 4 tahun 2013.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Luas permukiman di Kecamatan Darul Imarah yaitu sebesar 1.144,42 ha
2. Luas lahan yang di dicadangkan untuk permukiman di Kecamatan Darul Imarah berdasarkan RTRW Kabupaten Aceh Besar tahun 2012-2032 yaitu sebesar 1123,66 ha atau 46,15% dari luasan kawasan kajian.
3. Hasil penelitian ini menunjukkan seluas 1.019,61 ha (89,09%) permukiman di kawasan kajian telah selaras dengan RTRW dan seluas 124,80 ha (10,91%) permukiman eksisting lainnya tidak selaras dengan RTRW.

Saran

Diharapkan adanya penelitian lanjutan diakhir masa berlakunya RTRW Kabupaten Aceh Besar tahun 2012-2032 untuk melihat sejauh mana pengaruh Kota Banda Aceh terhadap penggunaan lahan di daerah kajian serta tingkat keselarasannya terhadap RTRW.

DAFTAR PUSTAKA

BPS Kabupaten Aceh Besar. (2016). *Kabupaten Aceh Besar dalam Angka 2016*. BPS Kabupaten Aceh Besar. Aceh.

Eko, T dan Rahayu, S. (2012). Perubahan Penggunaan Lahan Dan Kesesuaiannya Terhadap RDTR di Wilayah Peri-Urban Studi Kasus: Kecamatan Mlati. J*urnal Pembangunan Wilayah dan Kota*. *8* (4): 330 - 340.

Hardjowigeno, S dan Widiatmaka. (2007). *Evaluasi Kesesuaian Lahan & Perencanaan Tataguna Lahan*. Gadjah Mada University Press.

Kamaruzzaman. (2009). *Arahan Pemanfaatan Ruang dalam Pengembangan Wilayah Sub Urban Kota Banda Aceh Pasca Bencana Tsunami (Studi Kasus Kecamatan Ulee Kareng, Lueng Bata, Dan Banda Raya*). Tesis. Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Khadiyanto, P. (2005). *Tata Ruang Berbasis pada Kesesuaian Lahan*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Pemerintah Republik Indonesia. (2007). Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Pemerintah Republik Indonesia. (2011). Undang-undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Qanun Kabupaten Aceh Besar No.4. (2013). *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-2032*. Bappeda Kabupaten Aceh Besar. Jantho, Aceh.

Rahayu, S. (2009). Kajian Konversi Lahan Pertanian Di Daerah Pinggiran Kota Yogyakarta Bagian Selatan (Studi Kasus di Sebagian Daerah Kecamatan Umbulharjo). *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*. 5: 365 - 372.

Restina, N. (2009). *Evaluasi Penggunaan Lahan Eksisting dan Arahan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat*. Tesis. Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Rusdi, M., Roosli, R dan Ahamad, M.S.S. (2015). Land Suitability Evaluation For Settlement Based On Soil Bearing Capacity In Banda Aceh, Indonesia. *Advances in Environmental Biology.* 53-57.

Sirojuzilam. (2007). Perencanaan Tata Ruang dan Perencanaan Wilayah. *Jurnal Perencanaan & Pengembangan Wilayah*. 2 (3): 142-149.

Webster, D. (2002). On the Edge: Shaping the Future of Peri-urban East Asia. Stanford University. Institute for International Studies Asia/Pacific Research Center.